



Determinan Penyaluran Kredit Konsumsi pada Bank Konvensional

Hendro Wibowo dan Sutrisno

Universitas Islam Indonesia

sutrisno_uui@yahoo.com

Informasi Artikel

Tanggal masuk	02-12-2014
Tanggal revisi	07-01-2015
Tanggal diterima	06-02-2015

Keywords:

Loan to Value (LTV)

Non Performing Loan (NPL)

Inflasi

Third party funds

Consumer lending

Abstract

The aim of this research is to investigate variables affected to consumption credit distribution to the consumers of conventional banks in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY/Special Province of Yogyakarta); those variables includes Loan to Value (LTV), Third Party Funds (DPK), Non-Performing Loan (NPL), and inflation. The objects of this research are all conventional banks in DIY consist of 48 banks. The data usage is monthly data from 2010-2013 that was analyzed based on multiple linear regression. The findings show that LTV provide affects negative significantly towards distribution of consumption credit. Furthermore, DPK affects positive significantly towards credit distribution. NPL and inflation affect not significantly towards consumption credit.

Kata kunci:

Loan to Value (LTV)

Non Performing Loan (NPL)

Inflasi

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Kredit Konsumsi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi penyaluran kredit konsumsi bank umum konvensional di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meliputi rasio (*Loan to Value*) LTV, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL), dan inflasi. Objek penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional di DIY sebanyak 48 Bank. Data penelitian yang digunakan adalah data tahun 2010-2013 (secara bulanan) yang dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LTV berpengaruh signifikan negatif terhadap penyaluran kredit konsumsi, sementara DPK berpengaruh signifikan positif terhadap penyaluran kredit konsumsi, sedangkan NPL dan inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyaluran kredit konsumsi.

1. Pendahuluan

Pada tahun 2008 perekonomian dunia mengalami kelesuan akibat meningkatnya kredit macet pada sektor properti. Risiko kredit dapat ditimbulkan karena peningkatan nilai aset properti yang tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Upaya untuk meminimalkan risiko tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel yang memengaruhi penyaluran kredit.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP tahun 2013 mengenai Rasio LTV pada pro-

duk KPR, bertujuan untuk meningkatkan kehati-hatian bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan pemilikan properti. Selanjutnya kebijakan ini berguna untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan dalam rangka mencegah terjadinya *bubble economy*. Penelitian yang dilakukan Susanto (2012) menyatakan dengan kebijakan tersebut, kredit sektor tertentu yang berpotensi *bubble* dapat digeser ke sektor lain yang lebih membutuhkan seperti sektor kredit produktif.

Bank dapat mengantisipasi risiko kredit yang dapat terjadi dengan memperhatikan rasio NPL.

Soedarto (2004) menyatakan jumlah kredit non lancar mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap besar-kecilnya penyaluran kredit. Oleh karena itu semakin besar kredit non lancar maka jumlah kredit yang didapat disalurkan oleh bank semakin kecil, begitu sebaliknya.

Selanjutnya, semakin tinggi DPK yang dihimpun bank dari masyarakat maka semakin tinggi potensi bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005: 49).

Tingkat inflasi atau kenaikan harga yang terjadi juga memberikan pengaruh terhadap penyaluran kredit oleh bank umum. Inflasi memengaruhi tingkat suku bunga bank, semakin tinggi inflasi menyebabkan tingginya suku bunga kredit (Bambang, 2000: 123). Penelitian ini menggunakan variabel LTV, NPL, DPK dan inflasi untuk diuji pengaruhnya terhadap penyaluran kredit konsumsi.

2. Kajian Teori

2.1 LTV, DPK, NPL dan Inflasi

Berdasarkan SE No. 15/40/DKMP tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, rasio LTV adalah angka rasio antara nilai kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir. Peraturan ini bertujuan agar kredit pemilikan rumah digunakan untuk masyarakat yang memang belum memiliki rumah, bukan yang bertujuan untuk investasi.

Indikator lain dari kinerja perbankan, adalah DPK. DPK menunjukkan seberapa baik perbankan dapat menggali potensi sumber dana. Sumber dana bank berasal dari simpanan dalam bentuk giro (*demand deposit*), deposito berjangka (*time deposit*), dan tabungan (*saving deposit*). Kusnadi (2009) menyatakan bahwa DPK merupakan faktor yang mendukung penyaluran kredit perbankan. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun maka semakin besar pula jumlah kredit yang disalurkan.

Institusi Perbankan juga menggunakan rasio NPL sebagai salah satu alat ukur kinerja. NPL merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:462). Tingkat NPL

yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut kurang baik dalam mengelola kredit, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang dihadapi bank (Riyadi, 2006:161).

Aktivitas perbankan dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Salah satu indikator perekonomian yang mempengaruhi adalah inflasi. Inflasi akan mempengaruhi tingkat suku bunga SBI, selanjutnya suku bunga SBI akan mempengaruhi kondisi internal bank. Naiknya suku bunga SBI akan menyebabkan naiknya suku bunga tabungan, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap suku bunga kredit (Sun'an dan Kaluge, 2007).

2.2 Penelitian Terdahulu

Susanto (2012) menguji dampak rencana regulasi LTV pada kredit konsumsi di Indonesia. Penelitian tersebut menyatakan bahwa keuntungan dari adanya peraturan Bank Indonesia tentang LTV dapat mengalihkan penyaluran kredit konsumsi ke kredit produktif. Sedangkan Wong et al. (2011) menemukan LTV merupakan alat untuk mencegah terjadinya nilai properti yang naik secara drastis. Handoko dan Sumirat (2013) menyatakan bahwa kebijakan LTV dapat mengurangi jumlah kredit yang disalurkan. Penelitian ini menemukan beberapa nasabah BCA yang mengajukan aplikasi proses KPR melakukan pembatalan KPR akibat adanya penurunan LTV.

Soedarto (2004) meneliti faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit, menggunakan variabel tingkat suku bunga, tingkat kecukupan modal, jumlah simpanan masyarakat dan jumlah kredit non lancar. Hasil penelitian Soedarto (2004) menemukan bahwa simpanan masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit. Selanjutnya, kredit non lancar berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. Sukarno dan Syaichu (2006) juga menemukan bahwa NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank umum yang salah satunya ditunjukkan dengan penyaluran kredit bank umum.

Sariasih dan Dewi (2013) yang meneliti pengaruh DPK, NPL, dan Inflasi Terhadap Kredit, menemukan bahwa variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kredit yang diberikan. Pratama (2010) menguji faktor yang memengaruhi kebijakan penyaluran kredit Perbankan juga menemukan pengaruh DPK berpengaruh positif terhadap kebijakan penyaluran kredit dan NPL ber-

pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan kredit.

Iqlima (2010) menemukan variabel DPK dan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap kredit modal kerja, tetapi inflasi tidak berpengaruh. Nandadipa (2010) menguji faktor yang memengaruhi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai proksi kebijakan kredit dan menemukan DPK berpengaruh signifikan terhadap LDR.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berikut ini adalah beberapa hipotesis dalam penelitian ini:

1. *Loan to Value* dan Penyaluran Kredit Konsumsi

Schindler dan Laux (2011) menyatakan bahwa kebijakan LTV adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya *bubble economy* dengan cara menyesuaikan tingginya tingkat LTV disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu negara. Menurut Rahayu (2012), aturan LTV akan mengurangi pertumbuhan kredit sampai dengan akhir tahun 2013.

Penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian Handoko dan Sumirat (2013) menyebutkan bahwa beberapa nasabah BCA yang mengajukan aplikasi KPR membatalkan aplikasi tersebut dan dikhawatirkan penyaluran kredit KPR di BCA akan menurun. Stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank di dalam mengelola kredit dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Chu (2014) menyebutkan bahwa deregulasi perbankan di sektor kredit properti yaitu kebijakan LTV menyebabkan penurunan penyaluran kredit konsumsi. Sehingga dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Kebijakan LTV berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran kredit konsumsi.

2. Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit Konsumsi

Kegiatan bank umum konvensional yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk DPK dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Pertumbuhan dana pihak ketiga bank umum konvensional di akhir tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 mencapai 13.11%, sedangkan pertumbuhan kredit tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 8.50%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat di DIY cenderung menyimpan dana di bank daripada menggunakan untuk kegiatan investasi dalam bentuk properti.

Menurut Kasmir (2004:61), sumber dana bank dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu dari bank itu sendiri, dari lembaga keuangan lainnya dan dari masyarakat luas (dana pihak ketiga). Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat atau yang disebut juga dengan dana pihak ketiga ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan untuk membiayai setiap kegiatan operasionalnya. Salah satu kegiatan operasional bank yang sebagian besar dananya dibiayai oleh dana pihak ketiga adalah penyaluran kredit. Berdasarkan paparan tersebut maka pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Jumlah dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit konsumsi

3. NPL dan Penyaluran Kredit Konsumsi

Penelitian yang dilakukan Dinh et al. (2012) menyatakan sebelum krisis keuangan 2007 di Inggris, terjadi peningkatan penyaluran kredit konsumsi terutama di sektor properti dan pinjaman kartu kredit. Namun, hal tersebut tidak disertai dengan kemampuan pembayaran oleh debitur sehingga terjadi kredit bermasalah. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia (2013) menyatakan Bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit konsumsi. Bila pertumbuhan kredit konsumsi terlalu tinggi berpotensi mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (*bubble*).

Risiko pembayaran/pelunasan kredit akan tercermin di dalam rasio kredit bermasalah atau NPL. Menurut Pauzi (2011) rasio kredit bermasalah dikatakan masih cukup terjaga apabila masih di bawah batas maksimal 5%, Bank Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan LTV terutama di KPR bertujuan supaya praktek penyaluran KPR yang dilakukan bank umum akan lebih sehat serta meningkatkan prinsip kehati-hatian.

NPL yang tinggi akan menyebabkan bank membatasi penyaluran kredit kepada masyarakat untuk menghindari risiko kredit. Soedarto (2004) menyebutkan bahwa semakin besar NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang akan ditanggung bank sehingga jumlah kredit yang disalurkan akan semakin menurun. Sehingga dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit konsumsi

YOU CAN ACCESS FULL PAPER ON:

www.jraam.polinema.ac.id